

## ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI PROVINSI DKI JAKARTA DAN JAWA TIMUR TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Muthi Luthfiyana<sup>1</sup>, Meti Astuti<sup>2\*</sup>, Nunung Nurlaela<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Perbankan Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta  
\* Correspondent Author (meti.ast81@gmail.com)

### Abstrak

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dalam PMK RI No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan PDRB terbesar pertama dan kedua pada triwulan II PDRB Nasional 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan hasil kajian tersebut, penerapan PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Timur berdampak pada kontraksi perekonomian nasional.

*Kata Kunci: Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

### Abstract

*The Provinces of DKI Jakarta and East Java implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) based on the Regulation of the Minister of Health in PMK RI No.9 of 2020, concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). These two regions are the regions with the first and second largest GRDP in the second quarter of 2020 National GDP. Therefore, this study aims to determine the impact of the implementation of PSBB in DKI Jakarta and East Java Provinces on the national economy. This research uses descriptive qualitative research methods. The data sources for this research came from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia (BI). Based on the results of this study, the implementation of the PSBB in DKI Jakarta and East Java had an impact on the contraction of the national economy.*

*Keywords: Covid-19, Large-Scale Social Restrincitions (PSBB), Growth Domestic Product (GDP)*

## 1. PENDAHULUAN

Dunia secara global saat ini terkena dampak penyakit *novel coronavirus* (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penyakit *novel coronavirus* (Covid-19) sebagai pandemi global.<sup>1</sup> Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap ekonomi. Campbell Harvey, *Professor of Finance* di Duke University menjelaskan jika Covid-19 berbeda dengan Global Financial Crisis (GFC) di tahun 2008. GFC diakibatkan kesalahan manajemen institusi keuangan, sedangkan Covid-19 dapat dikatakan sebagai “*Natural Disaster*”. Harvey menyebut Covid-19 sebagai “*Great Compression*”.<sup>2</sup>

Dampak ekonomi Covid-19 diawali dengan *negative supply shock*, terdapat 2 hal yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, pekerja yang terinfeksi mengurangi jumlah kapasitas produksi. Atkeson mengatakan jika 10% populasi terinfeksi, maka keuangan dan infrastruktur ekonomi harus menghadapi pemotongan jumlah pekerja. Kedua, pembatasan aktivitas yang perlu dilakukan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak 75% penurunan kegiatan dalam kontak personal diperlukan untuk menurunkan kurva Covid-19.<sup>3</sup> Pada perekonomian global Covid-19

menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran di beberapa negara, dan anjloknya pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini akan menyebabkan peningkatan kemiskinan jika tidak dikeluarkannya kebijakan yang tepat.

Andry Satrio, *Head of Center of Investment, Trade, and Industry* INDEF menggambarkan siklus guncangan *supply and demand* di masa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat gelombang PHK, gelombang PHK menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena minimnya keuangan masyarakat, minimnya daya beli mengakibatkan permintaan barang menurun, sehingga produsen juga terkena dampaknya karena pendapatan produsen menurun, turunnya pendapatan produsen menyebabkan gelombang PHK baru. Siklus guncangan seperti rantai yang tidak akan terputus.<sup>4</sup>

Badan Pusat Statistika (BPS) merilis laporan perekonomian nasional Indonesia pada kuartal II (April-Mei-Juni) 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi sebanyak 5,32% (Y-on-Y). Industri Jasa Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi 29,22% (Y-on-Y) dari kuartal II 2019 sebesar 5,88%, Lapangan Usaha (LU) Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi 22,31% (Y-on-Y) pada kuartal II 2020 dari 5,53% (Y-on-Y) dari kuartal II 2019. Sementara LU Pertanian, Kehutanan, dan

<sup>1</sup> WHO, 26 March 2020, *Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19*.

<sup>2</sup> Harvey, A. C. 2020. *The economic and financial implications of COVID-19*

<sup>3</sup> Atkeson, Andrew. 2020. *What Will be the Economic Impact of COVID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios*.

<sup>4</sup> Andry Satrio. 2020. Menguji Kebijakan Industri di Tengah Covid-19 (webinar INDEF)

Perikanan mengalami pertumbuhan 2,19% (Y-on-Y). Hal tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang mengarah kepada resesi ekonomi global, kebijakan yang diambil untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 seperti penutupan sekolah, kegiatan bisnis, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota, bahkan *lockdown* mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi.<sup>5</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa, dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19.<sup>6</sup> Pelaksanaan PSBB tidak dilaksanakan secara nasional, akan tetapi kepada beberapa wilayah dengan tingkat penyebaran tinggi atau titik episentrum penyebaran Covid-19. DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi 2 (dua) wilayah yang menerapkan PSBB berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Penetapan pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/239/2020. Sedangkan pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/264/2020 dengan tujuan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pada kuartal II 2020 DKI Jakarta menempati posisi pertama dalam kontribusi struktur ekonomi nasional, yaitu 17,17% sedangkan Jawa Timur menempati posisi kedua sebanyak 14,60%. Oleh karena itu pelaksanaan PSBB di kedua wilayah

tersebut penting untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 10 April sampai 4 Juni 2020, dan kegiatan sosial ekonominya dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 5 Juni bersamaan dengan diterapkannya PSBB Transisi. Selama pelaksanaan PSBB tahap I, yaitu pada tanggal 10 – 23 April 2020 penambahan kasus terbanyak di tanggal 16 April 2020 sebanyak 174 kasus. Penambahan kasus terbanyak pada PSBB tahap 2, yaitu tanggal 24 April – 22 Mei 2020 di tanggal 13 Mei sebanyak 178 kasus. Penambahan kasus terbanyak saat pelaksanaan PSBB tahap III, yaitu tanggal 22 Mei – 4 Juni 2020 sebanyak 153 kasus di tanggal 2 Juni 2020. Grafik pertambahan kasus Covid-19 dan akumulasi data Covid-19 di DKI Jakarta selama masa PSBB.

Pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan kontraksi PDRB Jakarta sebanyak 8,22 % (Y-on-Y) atau 11,38% (q-to-q) pada kuartal II 2020. Sektor yang terdampak paling parah berdasarkan data PDRB DKI Jakarta pada kuartal II 2020 (Y-on-Y) adalah akomodasi dan makan minum sebanyak -34,81% (Y-on-Y), selanjutnya LU transportasi dan pergudangan -23,45%, industri pengolahan sebanyak -20,51% (Y-on-Y). Industri yang tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi sebanyak 12,71% (Y-on-Y), serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 9,65% (Y-on-Y).<sup>7</sup>

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik wilayah Provinsi Jawa Timur menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistika, 2020

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020, tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta

(PSBB) secara bertahap sejak 28 April sampai 8 Juni 2020. Penerapan PSBB Tahap I dilaksanakan pada 28 April – 11 Mei 2020, pada tahap ini pertumbuhan kasus terbanyak pada tanggal 10 Mei 2020 sebanyak 135 kasus. Pada tanggal 12 – 25 Mei 2020 dilaksanakan PSBB tahap II dengan penambahan kasus terbanyak 489 kasus pada 22 Mei 2020. PSBB tahap III dilaksanakan pada 26 Mei – 8 Juni 2020 dengan penambahan kasus terbanyak 265 kasus pada 7 Juni 2020, akan tetapi terjadi peningkatan kembali di tanggal 9 Juni menjadi 354 kasus. Grafik penambahan dan akumulasi data Covid-19 di Jawa Timur.

Pelaksanaan PSBB di tiga wilayah Provinsi Jawa Timur mengakibatkan terpukulnya lapangan usaha industri di semua subkategori industri kecuali industri makanan dan minuman, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Perdagangan mobil dan sepeda motor mengalami penurunan, begitu juga dengan perdagangan besar eceran terkhusus tekstil, pakaian jadi, rokok, serta mesin dan perlengkapannya. Lapangan Usaha (LU) transportasi dan pergudangan mengalami penurunan akibat pembatalan tiket kereta api dan penghentian sementara armada bus. Penyediaan makanan dan minuman terpuruk akibat pemberlakuan PSBB dan pelarangan konsumen untuk makan di tempat.

Ekonomi Jawa Timur terkontraksi -5,90% (Y-on-Y) dan -5,45% (q-to-q). Industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Jawa timur mengalami kontraksi -5,83%, penyumbang terbesar selanjutnya adalah perdagangan yang mengalami

kontraksi -12,25%. perubahan pertumbuhan lapangan usaha berdasarkan PDRB di kuartal II 2020 adalah kontraksi industri perdagangan sebanyak 2,30 %, dan kontraksi mengalami kontraksi -0,38. Pertumbuhan positif di kuartal II di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 0,8%.

Berdasarkan data tersebut, peneliti akan meneliti dampak pandemi bagi perekonomian nasional pada saat pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur Terhadap Perekonomian Nasional”.

### Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka Covid 19

Covid-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Kasus pertama diluar China dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2020 di Thailand.<sup>8</sup> *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *Coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan.

<sup>8</sup> D.Hui, et al. *The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronavirus to global health - The*

*latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China,*

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mendeklarasikan penyakit *novel coronavirus* (Covid-19) sebagai pandemi global.<sup>9</sup> Kamus epidemiologi mendefinisikan pandemi sebagai epidemik yang terjadi di seluruh dunia atau wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan mempengaruhi banyak orang.<sup>10</sup> Djalante Riyanti dkk (2020) mengutip pernyataan World Health Organization (WHO) pada tanggal 26 Maret 2020 yang mengeluarkan enam (6) strategi prioritas yang harus dijalani pemerintah dalam mengatasi pandemi, yaitu : (1) memperluas, melatih, dan menyebarkan tenaga kesehatan, (2) menerapkan sistem untuk menemukan *suspect*, (3) meningkatkan jumlah tes dan ketersediaan, (4) mengidentifikasi fasilitas atau tempat untuk menjadi pusat kesehatan Covid-19, (5) mengembangkan rencana untuk kasus karantina, dan (6) fokus kepada tindakan untuk menekan virus.<sup>11</sup>

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyatakan penetapan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Upaya

penanggulangan dilakukan dengan karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi.

### Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan keekarantinaan kesehatan merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor trisiko kesehatan masyarakat, sehingga wabah dan kedaruratan Covid-19 dapat segera diatasi. Salah satu bentuk keekarantinaan kesehatan yang dilakukan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memutuskan

<sup>9</sup> WHO, 26 March 2020, Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19.

<sup>10</sup> Last JM, editor. *A dictionary of epidemiology*, 4th edition. New York: Oxford University Press; 2001.

<sup>11</sup> Djalante Riyanti, dkk, *Review and analysis of current responses to Covid-19 in Indonesia; Period*

*of January to March 2020. Journal of progress in disaster science*. Elsevier. Amsterdam. 2020

<sup>12</sup> Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah. Keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan kasus kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertimbangan kedua adalah hal ini sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, maka Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mendefinisikan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Termasuk pembatasan pergerakan orang dan barang barang satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Pembatasan tersebut dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum.

Penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di suatu kota dapat diterapkan apabila suatu kota/wilayah memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) jumlah kasus dan atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. (2) Terdapat kaitan atau epidemiologis dengan kejadian serupa di negara lain. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama empat belas (14) hari, penentuan ini berdasarkan masa inkubasi terpanjang. Jika masih terdapat penyebaran kasus baru, dapat diperpanjang selama empat belas (14) hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

### **PSBB DKI Jakarta**

DKI Jakarta resmi menerapkan PSBB setelah Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/239/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Gubernur DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bab IV Pelaksanaan PSBB. Bagian Kesatu Umum Pasal 5 ayat 2 menyatakan PSBB Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang

<sup>13</sup> PMK No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Selama pelaksanaan PSBB setiap orang wajib untuk (1) melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS), dan (2) menggunakan masker di luar rumah.

Pembatasan aktivitas di luar rumah selama pelaksanaan PSBB meliputi, (1) pelaksanaan pembelajaran di Sekolah atau institusi pendidikan, (2) aktivitas berkerja di tempat kerja, (3) kegiatan keagamaan di rumah ibadah, (4) kegiatan di tempat atau fasilitas umum, (5) kegiatan sosial dan budaya, serta (6) pergerakan orang dan barang yang menggunakan alat transportasi.

#### a. PSBB Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur (1) pembatasan kegiatan dan pergerakan aktifitas masyarakat, (2) pengendalian penyebaran kasus dan jumlah kasus baru, (3) penguatan upaya pengendalian dan penanganan, serta (4) penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Pasal 5 Bagian Kesatu Bab II tentang Pelaksanaan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 18 Tahun 2020 menjelaskan PSBB di berlakukan di Kabupaten/Kota sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. PSBB yang dimaksudkan adalah pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.

Selama pelaksanaan PSBB, setiap orang wajib (1) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* dan perilaku hidup bersih Sehat (PHBS), (2) menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter di luar rumah, (3) melakukan isolasi mandiri baik dirumah ataupun ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan.

Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi (1) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, (2) pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan (PKL), dan atau kegiatan lainnya, (3) kegiatan bekerja di tempat kerja, (4) kegiatan keagamaan dirumah ibadah, (5) kegiatan di tempat atau fasilitas umum, (6) kegiatan sosial dan budaya, (7) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

### Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto atau GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari

perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran (Mankiw, 2007).<sup>14</sup> Sadono Sukirno, dalam bukunya yang berjudul *Teori Pengantar Ekonomi Makro* mendefinisikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing.<sup>15</sup>

Krugman, Paul R dan Obstfeld Maurice dalam bunya yang berjudul *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan, edisi kelima* membedakan jenis pengeluaran dalam GDP menjadi 4 (empat) unsur kemungkinan pengeluaran yang bisa dilakukan oleh suatu negara, yaitu (1) konsumsi, yakni jumlah yang dikonsumsi oleh rumah penduduk domestik swasta (di luar pemerintah), (2) investasi, yakni jumlah yang disisihkan oleh perusahaan swasta untuk membangun pabrik dan peralatan baru untuk keperluan produksi di waktu mendatang, (3) belanja pemerintah, yakni jumlah yang digunakan oleh pemerintah, serta (4) neraca transaksi berjalan, yaitu jumlah ekspor barang dan jasa netto ke luar negeri.<sup>16</sup>

Secara umum, *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara dengan perekonomian terbuka dapat diukur menggunakan persamaan berikut ini :

$$Y = C + I + G + EX - IM$$

Persamaan tersebut mengumpamakan Y sebagai GDP, C sebagai konsumsi, I sebagai investasi, G sebagai pengeluaran pemerintah, EX sebagai ekspor, yaitu jumlah belanja penduduk luar negeri untuk menambah pendapatan nasional bagi perekonomian domestik, dan IM sebagai impor. Sehingga dapat dikatakan jika GDP merupakan penjumlahan belanja domestik dan pengeluaran pihak luar negeri atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik.

### Pandemi Dalam Pandangan Islam

Wabah atau *tha'un* pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan menyerang sebuah daerah. *Tha'un* merupakan sebuah wabah penyakit menular yang mematikan, pada saat itu penyebab *tha'un* adalah bakteri *pasterella pestis* yang menyerang tubuh manusia. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina penderitanya pada tempat khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Jika wabah atau *tha'un* tersebut menimpa umat muslim, maka dijanjikan surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar dengan wabah tersebut (Eman, 2020).

"Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari).

<sup>14</sup> Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga

<sup>15</sup> Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi, teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

<sup>16</sup> Kraugman, Paul R. Obstfeld Maurice. 2005. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima*. Jakarta. PT Indeks Kelompok GRAMEDIA

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fath Al-Bari* bi Syarh Shahih Al-Bukhari menuliskan sebuah kisah bahwa Khalifah Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syarh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin 'Awf memberitahunya bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِ مِنْهُ دَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ  
«بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا»

"Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri".<sup>17</sup>

## 2. KAJIAN LITERATUR

Asep Suryahadi dkk, 2020 dalam *The Impact of Covid-19 Outbreak and Poverty: An Estimation for Indonesia* menyimpulkan Covid-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September 2020. Ini menunjukkan 1,3 juta orang akan memasuki jurang kemiskinan. Kemudian Eichenbaum, dkk. tahun 2020 dalam penelitian *The Macroeconomics of Epidemics* menyimpulkan dalam keputusan untuk mengurangi pekerjaan dan konsumsi di masa pandemi akan mengurangi jumlah kematian, akan tetapi mengakibatkan resesi. Richard D., dkk tahun 2011 dalam penelitiannya juga menyimpulkan Pandemi akan berdampak terhadap sektor ekonomi. Terdapat 3 skenario dengan fatality rate

0,06% (ringan), 0,18% (sedang), dan 0,35% (berat). Skenario ini mempertimbangkan kesigapan kebijakan penutupan sekolah, dan pembatasan aktivitas. Fatality rate pandemi influenza ringan mengurangi PDB UK sebesar 1,1% (£14,7 M), 1,3% (£16,3 M), dan 1,4% (£18,5 M). Clement A. 2020 dalam penelitiannya "*Economic, social and political issues raised by the Covid-19 pandemi*" juga menyebutkan Kebijakan yang tepat harus dirancang untuk mengatasi dampak pandemi. keadaan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data kuantitatif yang berupa sekunder selama penerapan PSBB DKI Jakarta dan Jawa Timur pada Pandemi Covid 19 tahun 2020. Data yang disajikan berupa data pertumbuhan ekonomi nasional dan regional dan dilakukan analisis deskriptif terhadap perbandingan data dengan tahun sebelum diberlakukan PSBB tersebut, sehingga merupakan penelitian kualitatif non interaktif dengan teknik analisis data eksplanasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan PSBB DKI Jakarta dan Perekonomian Nasional

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 sampai 4 Juni 2020, menyebabkan PDRB DKI Jakarta pada

<sup>17</sup> Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1372. *Fath Al-Bari* bi Syarh Shahih Al-Bukhari. Jakarta : Pustaka Azzam

kuartal II 2020 berkontraksi hingga -8,22% (Y-on-Y), menurun dibandingkan kuartal I 2020 yang tumbuh 5,06% (Y-on-Y).

Penurunan perekonomian akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak terhadap perekonomian DKI Jakarta dan perekonomian nasional. Meskipun mengakibatkan kontraksi ekonomi pada DKI Jakarta dan Nasional, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mampu memperlambat penyebaran Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19.

Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Martin S. Eichenbaum, Sergio Rebelo, dan Mathias Trabandt dalam *paperwork* berjudul *The Macroeconomics of Epidemic* yang menjelaskan jika keputusan untuk mengurangi konsumsi dan pekerjaan dapat mengurangi dampak pandemi dengan cara menurunkan angka kematian. Keputusan ini juga memperbesar dampak resesi secara bersamaan.

Sejalan dengan hasil penelitian SIR Macro Models, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 berimbas terhadap penurunan konsumsi Rumah Tangga DKI Jakarta di kuartal II 2020, menjadi sebesar -5,23% (Y-on-Y). Angka ini merupakan kondisi terendah sejak krisis tahun 1998.

Kebijakan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2020, sebagai upaya untuk melakukan penanganan Covid-

19 dan pengamanan daya beli masyarakat, sejalan dengan penelitian *Economic, social and political issues raised by the Covid-19 pandemi* yang menyatakan jika kebijakan yang tepat harus dirancang untuk mengatasi dampak pandemi. Keadaan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan.

Penurunan kinerja investasi pada kuartal I dan II 2020, penurunan kinerja ekspor pada kuartal I, dan penurunan kinerja impor pada kuartal II yang terjadi beriringan dengan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), demi mencegah penyebaran Covid-19 sejalan dengan penelitian *The socio-Economic Implications of the corona virus pandemi (Covid-19)–A Review* yang menyatakan jika bayangan resesi dan keruntuhan finansial harus diseimbangi dengan mendorong wirausaha dan bisnis supaya dapat berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan ekonomi jangka menengah dan panjang agar terjadi keseimbangan dan energi baru setelah krisis.

Perekonomian DKI Jakarta pada kuartal I dan II 2020, secara umum mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, kebijakan *work from home* (WFH) dan *school from home* (SFH) serta *physical distancing* secara ringkas, kebijakan ini terangkum dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengatur untuk menjaga jarak, mengurangi jam kerja, dan melakukan aktivitas secara *online* demi mencegah penyebaran Covid-19. Penurunan terjadi pada sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan

impor. Penurunan diseluruh sektor berdampak terhadap penurunan PDRB DKI Jakarta yang berkontraksi sebesar -8,22% (Y-on-Y).

DKI Jakarta merupakan penyumbang perekonomian daerah terbesar pada kuartal II 2020, sehingga penurunan perekonomian di DKI Jakarta berdampak terhadap perekonomian nasional atau PDB Nasional. Hal tersebut dikarenakan penurunan perekonomian DKI Jakarta terjadi pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, serta ekspor-impor. Penurunan pada komponen-komponen tersebut yang mengakibatkan penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejalan dengan teori perhitungan PDB pada perekonomian terbuka.

Maka kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 di DKI Jakarta akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 10 April 2020 sampai 4 Juni 2020 berdampak sebanyak 17,17% terhadap penurunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

## 2. Pelaksanaan PSBB Jawa Timur dan Perekonomian Nasioal

PDRB Jawa Timur pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi -5,90% (Y-on-Y). Penurunan ini dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas sosial ekonomi atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur terlaksana pada 28 April 2020

sampai 8 Juni 2020 di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang Raya.

Perbedaan penurunan PDRB pada kuartal I dan II 2020 diakibatkan oleh pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial, hal ini mengakibatkan penurunan produksi yang berdampak kepada penurunan lapangan usaha, konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Hal ini dikarenakan, kasus pandemi Covid-19 pada kuartal II lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pada kuartal I. Sehingga, perekonomian Jawa Timur pada kuartal II berkontraksi dalam jika dibandingkan dengan kuartal I 2020. Hal ini sejalan dengan penelitian *Estimating the economic impact of pandemi influenza: An application of the computable general equilibrium model to the UK*,

Perubahan signifikan antara kuartal I dan II 2020 dengan kuartal IV 2019, pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi akibat pandemi Covid-19 dan pelemahan global, yang sejalan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, sejalan dengan penelitian *The Macroeconomics of Pandemic* yang menyatakan jika keputusan untuk mengurangi konsumsi dan pekerjaan pada masa pandemi, berdampak terhadap penurunan jumlah kasus pandemi, akan tetapi hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian.

Kinerja net ekspor antardaerah pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi -29,64% (Y-on-Y) akibat pembatasan aktivitas

masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Kontraksi net ekspor antardaerah berimbang kepada penurunan ekspor LN dan impor LN. Angka ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang terkontraksi -8,94% (Y-on-Y). Penurunan perekonomian pada sektor ekspor dan impor di kuartal II 2020 diakibatkan oleh penurunan antardaerah, hal ini dikarenakan pada kuartal II 2020 kota-kota besar di Indonesia melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan secara nasional melakukan aktivitas *physical distancing*. Hal ini menyebabkan penurunan konsumsi dan produksi secara umum pada mitra dagang Jawa Timur.

Sejalan dengan teori perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan sektor-impor, penurunan PDRB Jawa Timur terjadi pada komponen-komponen tersebut, akibat perlambatan perekonomian global, dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur pada kuartal II 2020, yang dilaksanakan sejak 28 April 2020 sampai 8 Juni 2020 berdampak terhadap penurunan perekonomian nasional sebesar 14,60%.

### **Pandangan Islam Terhadap Pandemi**

Imam Ibnu Katsir, dalam catatannya menceritakan kisah pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab yang terjadi dua bencana. Bencana pertama merupakan bencana kekeringan yang terjadi di Madinah. Ibu kota pemerintahan Islam tersebut dilanda bencana kelaparan akibat perubahan cuaca.

Bencana yang terjadi pada tahun 18 Hijriyah tersebut, membuat tanah di kota madinah menghitam karena sedikitnya hujan. Para ulama menyebut tahun ini sebagai '*am ramadha*' atau tahun kekeringan. Belum selesai bencana di Madinah, Syam diserang wabah '*Thaūn Amwās*'. Wabah ini dikabarkan menghantarkan kematian tidak kurang dari 30 ribu rakyat. Beberapa sahabat Khalifah Umar seperti Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, dan Suhail bin Amr wafat akibat wabah ini.

'*Am Ramadha*' merupakan kata yang diambil dari situasi pada masa itu, digambarkan kondisi pada masa itu tanah berwarna hitam karena tidak turun hujan, hewan-hewan ternak mati, dan banyak manusia yang terjangkit penyakit pada masa itu. *Thaūn Amwās* atau wabah Pes menyerang wilayah Syam, hal ini mengakibatkan banyaknya kematian dan perdagangan melalui Syam terhenti, Syam merupakan mitra perdagangan Madinah yang sangat penting. Madinah mendapatkan barang berupa bahan makanan dan pakaian dari Syam, maka ketika Syam terjangkit wabah, Madinah tidak dapat menerima makanan dan pakaian yang berasal dari Syam.

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari* menuliskan sebuah kisah bahwa Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syarh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin 'Awf memberitahunya bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ مِنْهُ «وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» menyelesaikan 'am ramadha. (4) Pada masa krisis banyak terjadi pencurian, dan dalam Islam hukuman untuk pencurian adalah potong tangan. Akan tetapi, pada masa itu Khalifah Umar ra menganulir penetapan had atau potong tangan karena pada saat itu orang melakukan pencurian dalam keadaan terdesak memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk memperkaya diri.

*"Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri."<sup>18</sup>*

Larangan untuk keluar dari wilayah yang terkena wabah dimaksudkan untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi penyebaran wabah, maka resiko kematian bagi rakyat yang lain akan lebih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk melarang keluar dari wilayah wabah dan larangan untuk memasuki wilayah wabah.

'Am ramadha menimbulkan krisis perekonomian akibat perekonomian yang menurun, dan defisit Baitul Mal. Untuk mengatasi krisis dan mencegah efek dari krisis tersebut. Dalam buku Fiqih Ekonomi Umar bin Khatab karya Jaribah bin Ahmad Al Harisi, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar ra untuk mengatasi krisis pada masa itu, yaitu: (1) Khalifah Umar ra mengambil kebijakan untuk menunda pengambilan zakat binatang ternak karena banyaknya hewan yang mati. (2) Khalifah Umar mengarahkan sumber daya dari Baitul Mal untuk membantu orang-orang yang terkena krisis dan memberikan mereka makanan dan harta, hingga Baitul Mal mengalami defisit. (3) Khalifah Umar ra menetapkan prioritas infaq untuk

Keputusan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ra untuk menyelesaikan krisis tersebut merupakan perpaduan antara keimanan dan kecerdasan. Pada saat terjadi krisis Khalifah Umar ra meminta kepada rakyatnya untuk senantiasa beriman dan bertawakal kepada Allah SWT, karena krisis tersebut merupakan qadha dari Allah SWT. Sebagai bentuk ikhtiar mengatasi krisis tersebut, Khalifah Umar ra memutuskan untuk membatalkan perjalanan pentingnya ke Syam karena terjadi wabah, dan membuat kebijakan yang sesuai agar rakyat yang saat itu terkena krisis ramadha tidak terdzalimi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta tahap 1, 2, dan 3 sejak tanggal 10 April 2020 sampai 4 Juni 2020 berdampak terhadap perekonomian DKI Jakarta yang mengalami kontraksi pada kuartal II 2020 sebesar -8,22% (Y-on-Y). Kontraksi ekonomi terjadi pada komponen permintaan DKI Jakarta, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi

<sup>18</sup> Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1372. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Jakarta : Pustaka Azzam

pemerintah, investasi, dan ekspor – impor. Kontraksi ekonomi pada kuartal II di DKI Jakarta berimplikasi terhadap penurunan perekonomian nasional sebesar -17,17%.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur pada tanggal 28 April 2020 sampai 8 Juni 2020, berdampak terhadap perekonomian Jawa Timur pada kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -5,90% (Y-on-Y). Kontraksi perekonomian Jawa Timur pada kuartal II 2020, disebabkan oleh penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor – impor. Kontraksi ekonomi pada kuartal II di Jawa Timur berimplikasi terhadap penurunan perekonomian nasional sebesar -14,60%.

Pandangan Islam terhadap pandemi adalah meyakini bahwasanya hal tersebut merupakan qadha dari Allah SWT yang harus kita terima. Sebagai bentuk ikhtiar untuk menyelesaikan masalah pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Bercermin dari cara Khalifah Umar ra mengatasi wabah dan 'am ramadha yang bijaksana dan cemerlang, tanpa mendzalimi rakyatnya. Maka, untuk mengatasi pandemi dan dampak yang ditimbulkannya pemimpin Negara harus mampu menggabungkan kekuatan keimanan dan kecerdasan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persana, Depok, 2014

Al-Asqalani, Ibnu Hajar (terj), *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007

Atkeson, Andrew, *What Will be the Economic Impact of COVID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios*, NBER Working Paper No. 26867, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA: 2020

Andry Satrio, *Menguji Kebijakan Industri di Tengah Covid-19, 2020* (Dipresentasikan pada ISPE Lecture oleh INDEF)

Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2020 ( Provinsi DKI Jakarta)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020 ( Provinsi DKI Jakarta)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2020 ( Provinsi Jawa Timur)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020 ( Provinsi Jawa Timur)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS), *Laporan Berita Resmi Statistik Ekonomi Nasional Triwulan I 2020*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS), *Laporan Berita Resmi Statistik Ekonomi Nasional*

- Triwulan II 2020*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Bank Indonesia (BI), *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2020*, Bank Indonesia, Jakarta, 2020
- Clement A. Tisdell *Economic, social and political issues raised by the Covid-19 pandemic* Journal Economic Analysis and Policy 68 (2020) 17–28, Elsevier, Amsterdam, 2020
- Djalante Riyanti, dkk, *Review and analysis of current responses to Covid-19 in Indonesia; Period of January to March 2020* Progress in disaster science 6 (2020) 100091, Elsevier, Amsterdam, 2020
- Harvey, A. C. 2020. *The economic and financial implications of COVID-19* pada <https://www.darden.virginia.edu/sites/default/files/inline-files/COVID-19%20Presentation%20Cambell%20Harvey.pdf>2020. (Di akses pada 3 Juni 2020)
- Hausmann, Ricardo, *Flattening the COVID-19 Curve in Developing Countries* pada <https://www.project-syndicate.org/commentary/flattening-covid19-curve-in-developing-countries-by-ricardo-hausmann-2020-03>. 2020. (diakses pada 5 Juni 2020)
- Hui, David S, dkk. *The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronavirus to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China* International Journal Infectious Diseases 91 (2020) 264 - 266, Elsevier, Amsterdam, 2020
- Kraugman, Paul R. Obstfeld Maurice (terj), *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima*, PT Indeks Kelompok GRAMEDIA, Jakarta, 2005
- Last JM, editor. *A dictionary of epidemiology*, 4th edition, Oxford University Press, New York, 2001
- Mankiw, N.Gregory (terj), *Makroekonomi, Edisi Keenam*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Maria Nicolaa, dkk, *The socio-Economic Implications of the corona virus pandemic (Covid-19) – A Review* International Journal of Surgery 78 (2020) 185–193, Elsevier, Amsterdam, 2020
- Martin S. Eichenbaum, Sergio Rebelo, dan Mathias Trabandt, *The Macroeconomics of Epidemics* NBER Working Paper No. 26882, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA. 2020

- McKibbin, Warwick, Roshen Fernando, *The economic impact of Covid-19*, Center of Economic Policy Research (CEPR), London, 2020
- Milles. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992
- Richard D. Smith, Marcus R. Keogh-Brown, Tony Barnett, *Estimating the economic impact of pandemi influenza: An application of the computable general equilibrium model to the UK* Journal Social Science & Medicine 73 (2011) 235e244, Elsevier, Amsterdam, 2011
- Sumaidi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi, teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Suryahadi, Asep, Ridho Al-Izzati, Daniel Suryadarma, *The Impact of Covid-19 Outbreak and Poverty: An Estimation for Indonesia* SMERU Working Paper, SMERU Institute, Jakarta, 2020
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002
- Trislitanto, Dimas Agung, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap dan Mudah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020
- United Nations, 25 March 2020, *Launch of global humanitarian response plan for COVID-19*, United Nations, New York, 2020
- World Health Organization (WHO), *Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 : interim guidance*, World Health Organization (WHO), Jenewa, 2020
- World Bank, *Global Economic Prospect East Asia and Pacific Period June 2020*. World Bank, Washington D.C, 2020
- World Bank, *Global Economic Prospect June 2020*, World Bank, Washington D.C, 2020